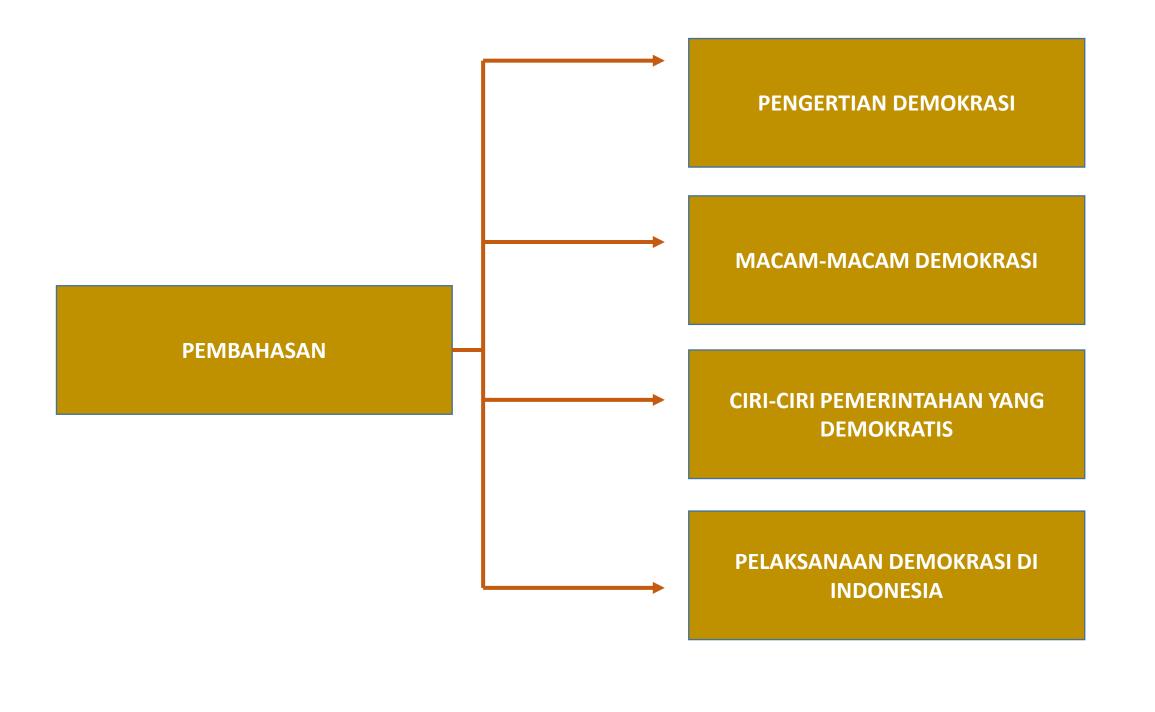


PERTEMUAN 13,14

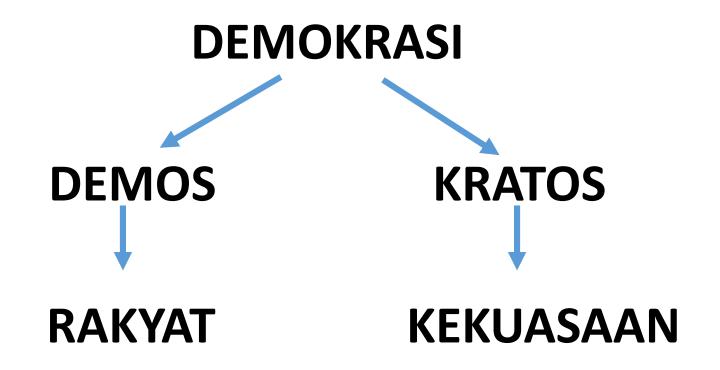




Sri ANGGRAINI KUSUMA DEWI, SH., M.Hum. UNIVERSITAS MERDEKA SURABAYA

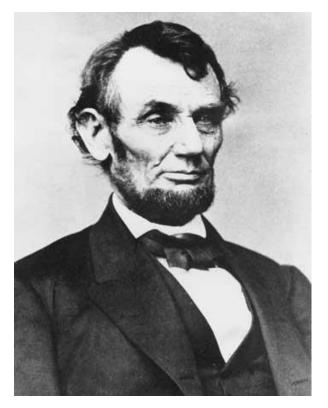


Demociacy



Jadi, Demokrasi adalah Sistem pemerintahan yang kekuasaan tertingginya dipegang oleh rakyat.

PENGERTIAN DEMOKRASI MENURUT PARA AHLI



"Demokrasi adalah suatu pemerintahan yang berasal dari rakyat, olehrakyat dan untukrakyat. Dapat disimpulkan bahwa pemegang kekuasaan yang tertinggi dalam suatu sistem demokrasi yaitu ada di kuasa rakyat dan rakyat memiliki hak, kesempatan dan suara yang sama untuk mengontrol dan mengatur kebijakan pemerintah melalui keputusan yang terbanyak." -Abraham.L-

"Demokrasi adalah suatu kebijaksanaan umum yang ditetapkan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasisecara efektif oleh rakyat dalam setiap pemilihan yangdidasarkanatas prinsip kesamaan politik dan dilaksanakan dalam suasana dimanaterjadi kebebasan politik."-Hannry B.Mayo-

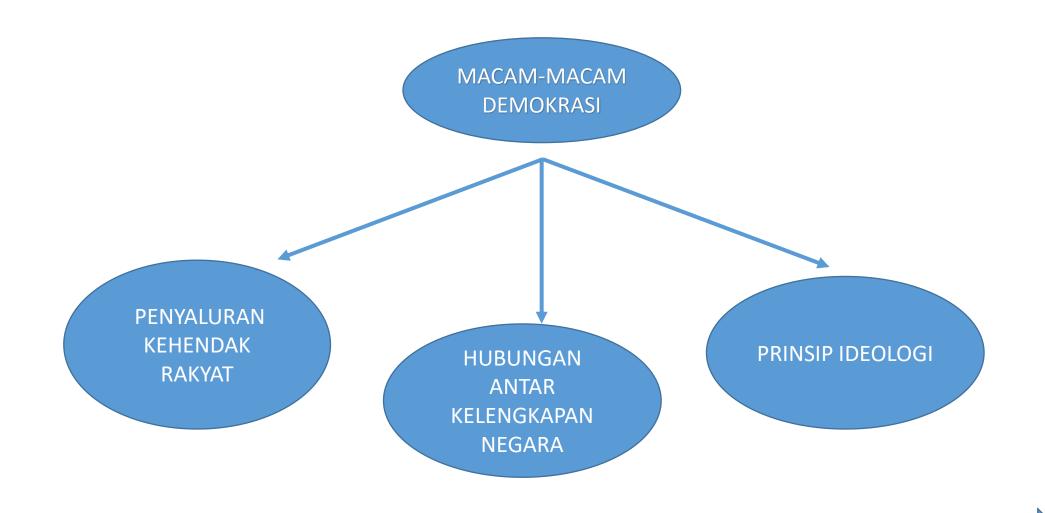


"Demokrasi adalah suatu dasar didalam pembentukan pemerintahan dan berada didalamnya atau masyarat dalam sebuah kekuasaan untuk mengatur dan memerintah agar dikendalikan secara sah oleh setiap seluruh warga negara." -Prof. Mr. Muhammad Yamin-



PRINSIP DEMOKRASI

- Lembaga legislatif
- Lembaga eksekutif
- Lembaga yudikatif
- Pesr sebagai alat kontrol masyarakat



NEXT



Demokrasi langsung

Demokrasi langsung adalah sistem demokrasi yang mengikutsertakan atau melibatkan seluruh rakyat yang dilakukan secara langsung dalam membicarakan atau menentukan urusan-urusan negara.

Demokrasi tidak langsung

Demokrasi tidak langsung/perwakilan adalah sistem demokrasi yang melibatkan rakyat, pengambilan keputusan suatu negara secara tidak langsung dengan menyalurkan kehendaknya, rakyat memilih wakil yang telah dipercaya untuk menjabat dalam parlemen sebagai penyalur aspirasi rakyat.



Demokrasi perwakilan dengan sistem refrendum

Adalah sistem demokrasi dimana rakyat memilih perwakilan untuk menjabat di parlemen yang tetap dikontrol oleh rakyat dengan sistem refrendum

Demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer

Adalah sistem demokrasi yang terjadi karena adanya hubungan erat antara badan eksekutif dan legislatif.

Demokrasi perwakilan dengan sistem pemisahan kekuasaan

Adalah suatu sistem demokrasi dimana eksekutif dan legislatif kedudukannya terpisah

Demokrasi perwakilan dengan sistem refrendum dan inisiatif rakyat

Adalah gabungan dari demokrasi perwakilan/tidak langsung dan demokrasi secara langsung.





Demokrasi Liberal

Demokrasi liberal adalah sistem demokrasi yang menekankan kepada kebebasan individu yang sering mengabaikan kepentingan umum



Demokrasi Rakyat

Demokrasi rakyat adalah demokrasi yang didasari dari paham sosialisme dan komunisme yang mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan umum

Demokrasi Pancasila

Demokrasi pancasila adalah demokrasi yang bersumber dari tata nilai sosial dan budaya bangsa indonesia dengan berasaskan musyawarah mufakat yang mengutamakan kepentingan umum.



BACK

CIRI-CIRI PEMERINTAHAN DEMOKRATIS



- 1. Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan).
- 2. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang.
- 3. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara.
- 4. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.

PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA

- Ada 4 masa :
- Masa Republik Indonesia I (1945-1959), DEMOKRASI KONSTITUSIONAL
- Masa Republik Indonesia II (1959-1965), DEMOKRASI TER
- Masa Republik Indonesia III (1966-1998), DEMOKRASI KONSTITUSIONAL dengan sistem PRESIDENSIL
- Masa Republik Indonesia IV (1998-sekarang), MASA REFORMASI

PELAKSANAAN DEMOKRASI DI INDONESIA

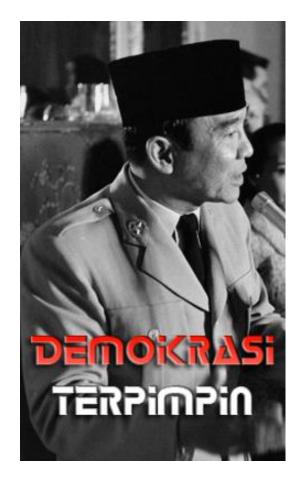




- Berlangsung ketika berlakunya konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950.
- Pemegang kekuasaan terhadap jalannya pemerintahan secara luas berada di tangan parlemen.
- Parlemen dapat membubarkan cabinet pemerintahan yang berkuasa.
- Dikenal pula sebagi demokrasi liberal.

Penyimpangan:

- Kekuasaan presiden hanya terbatas sebagai kepala negara.
- Kekuasaan Pemerintah dilaksanakan oleh partai.
- Perbedaan ideologi dari partai-partai yang berkembang masa demokrasi parlementer menimbulkan perbedaan pemahaman mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdampak pada terancamnya persatuan di Indonesia.



b. Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

- Berlangsung setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 oleh Soekarno.
- Dijalankan berintikan musyawarah mufakat secara gotong-royong dan secara idiologis yang berkembang.
- Pemegang kekuasaan terhadap jalannya pemerintahan secara luas berada di tangan presiden.

Penyimpangan:

- Penataan kehidupan politik menyimpang dari tujuan awal, yaitu demokratisasi (menciptakan stabilitas politik yang demokratis) menjadi sentralisasi (pemusatan kekuasaan di tangan presiden).
- Kebebasan partai dibatasi.
- Presiden cenderung berkuasa mutlak sebagai kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan.

c. Demokrasi Pancasila (1966-1998)

- Didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagaimana termuat dalam pembukaan UUD'45.
- Pada masa orde baru pemegang kekuasaan terhadap jalannya pemerintahan secara luas berada di tangan presiden.
- Bertekad akan melaksanakan Pancasiladan UUD 1945 secara murni dan konsekwen.

Penyimpangan:

- Pilar-pilar demokrasi seperti partai politik, lembaga perwakilan rakyat, dan media massa berada pada kondisi lemah.
- Media massa selalu dibayang-bayangi pencabutan surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP).
- Rakyat tidak diperkenankan menyelenggarakan aktivitas social politik tanpa izin dari pemerintah.
- Pembagunan tidak merata tampak dengan adanya kemiskinan di sejumlah wilayah.

Demokrasi pada masa orde baru ini dianggap gagal sebab:

- 1. Rotasi kekuasaan eksekutif hamper dikatakan tidak ada.
- 2. Rekrutmen politik yang tertutup.
- 3. Pemilu yang jauh dari semangat demokratis.
- 4. Pengakuan HAM yang terbatas.
- 5. Tumbuhnya KKN yang merajalela.

d. Demokrasi Pancasila Masa Reformasi (1998-sekarang)

- Kekuasaan pemerintahan terdistribusi sehingga adanya keseimbangan kekuasaandan control dari setiap lembaga kekuasaan.
- menekankan pada nilai-nilai demokrasi yang berlaku universal di dunia yaitu:
 - 1) penghargaan atas kebebasan;
 - 2) penghargaan atas kesamaan;
 - 3) penghargaan akan partisipasi dalam kehidupan bersamarakyat; dan
 - 4) penghargaan atas perbedaan.

- Mendasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.
- Meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara dengan menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif.

DEMOKRASI dalam PANDANGAN ISLAM

- Ada 3 pemikiran yang dikelompokkan
- 1. Islam dan demokrasi adalah dua sistem politik yang berbeda, dimana Islam tidak bisa disubordinatkan dengan demokrasi sedangkan Islam merupaka sistem politik yang mandiri, dan hubungan keduanya saling menguntungkan secara ekslusif serta Islam dipandang juga sebagai sistem alternatif demokrasi

- Ada 3 pemikiran yang dikelompokkan
- 2. Islam dan demokrasi apabila demokrasi diartikan secara prosedural dimana dapat dipahami dan dipraktikkan di dunia barat. Islam, merupakan sistem demokratis secara substantif, yakni bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan negara merupaka terjemahan dari kedaulatan rakyat.

Demokrasinya sendiri adalah sejalan dengan Islam setelah

- diadakan penyesuaian penafsiran terhadap demokrasi itu sendiri.
- 3. Islam adalah sistem nilai yang membenarkan dan
- mendukung sistem demokrasi

Demokrasi dan Negara Hukum

• Demokrasi dan negara hukum adalah 2 konsepsi yang tidak dapat dipesahkan, dimana demokrasi mengandung pikiran-pikiran kedaulatan rakyat sedangkan dalam negara hukum mengabdung prinsip-prinsip nomokrasi, yang masing-masing prinsip dari kedua konsepsi yang bisa dijalankan secara beriringan seperti dua sisi dari mata uang yang dapat dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan

- Prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi
- 1. Prinsip negara hukum
- 2. Perlindungan hak asasi manusia
- 3. Keterikatan pemerintah

- 4. Monopoli paksaan pemerinah untuk menjamin penegakan hukum
- 5. Pengawasan oleh hakim yang merdeka dalam organ-organ pemerintah melaksanakan dan menegakkan aturan hukum

- 2. Prinsip-Prinsip Demokrasi
- a. Perwakilan politik
- b. Pertanggung jawaban politik
- c. Pemencaran kewenangan, konsemtrasi kekuasaan dalam

masyarakat pada suatu organ pemerinth adalah

kesewenang-wenangan

- d. Pengawasan dan konrol peneyelenggaraan pemerintah harus dapat dikontrol
- e. Kejujuran dan terbuka untuk umum
- f. Rakyat diberikan kemungkinan untuk mengajukan keberatan

KESIMPULAN

- Negara Indonesia sebagai negara hukum, dimana dapat ditemukan :
- 1. Pembukaan UUD 1945 alinea 4
- 2. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945
- 3. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945
- 4. Pasal 28 I ayat (5) UUD 1945
- 5. UU Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan pada pasal 2

Negara Indonesia adalah negara modern

DISKUSI

TEMA

•" NEGARA HUKUM dan Demokrasi di Indonesia "

